

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Dwipayana, Aang Ari, 2003. *“Membangun Good Governance di Desa.”* Yogyakarta : IRE
- Dwiyanto, Agus. 2006. *“Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik”*. Yogyakarta : UGM
- Hardiyansyah. 2011. *“Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya”*. Yogyakarta : GM
- Karim, Abdul Gaffar. 2003. *“Indikator dan Alat Ukur Prinsip Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas.”* Jakarta : BAPPENAS
- Mamarimbing, Melisa Olivia. 2015. *“Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pembangunan Fisik Desa.”*
- Moleong, Lexy J. 2005. *“Metode Penelitian Kualitatif.”* Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Pambudi, Himawan. 2001. *“Politik Pemberdayaan, Jalan Mewujudkan Otonomi Desa.”* Yogyakarta : Laperapustaka Utama.
- Ratminto. 2005. *“Manajemen Pelayanan”*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Ratnawati, Tri. 2006. *“Potret Pemerintahan Lokal Di Indonesia di Masa Perubahan Tahun 2000-2006”*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Sabarno, Hari. 2007. *“Memandu Otonomi Daerah, Menjaga Kesatuan Bangsa”*. Jakarta : Sinar Grafika
- Sedarmayanti. 2003. *“Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah.”* Bandung : Mandar Maju
- Sekaran, Uma. 2011. *“Metode Penelitian Untuk Bisnis. Edisi Enam.”* Jakarta : Salemba Empat
- Sholekhan, Moh. 2012. *“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas.”* Malang : Setara Press.
- Sirajuddin, Sukriano Didik, dan Winardi, 2012. *“Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi).”* Jakarta : Setara Press.
- Sugiyono, 2008. *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D.”* Bandung : Alfabeta
- Sulistiyani, Ambar. 2005. *“Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia”*. Yogyakarta : Gaya Media
- Sutopo, Wawan. 2015. *“Mewujudkan Good Village Governance dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”*.

Zeithami, Parasurman, Berry. 1990. *“Delivering Quality Service.”* New York : The Free Press

## **B. Undang-undang**

Undang-undang Nomor.28 Tahun 1999, *“Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme”*.

Undang-undang Nomor.32 Tahun 2004, *“Pemerintah Daerah”*.

Undang-undang Nomor.33 Tahun 2004, *“Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah”*.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Jakarta : Sekretaris Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## **C. Sumber Lain**

<https://Acurasi.Unram.Ac.ID> Article diakses pada 9 juli 2020 jam 10 :40 :21

<https://docplayer.info> diakses pada 10 juli 2020 jam 18 : 32 : 22

<https://repository.Unhas.Ac.Id> diakses pada 10 juli 2020 jam 18 : 35 : 30

<https://risehtunong.blogspot.com> diakses pada 10 juli 2020 jam 18 : 41 : 46

<https://pakarkomunikasi.com> diakses pada 11 Juli 2020 jam 19:22:12

<https://id.m.wikipedia.org> diakses pada 11 juli 2020 jam 19:27:10

<https://merdesa.Id> diakses pada 11 juli 2020 jam 19:35:54